



RENSTRA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026



MARET 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026. Sebagai salah satu dokumen perencanaan. Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Tidak hanya itu, Renstra juga menjadi bahan acuan dalam proses manajemen kinerja secara keseluruhan yang meliputi : 1) Penyusunan rencana kinerja (*performance plan*); 2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran (*workplan and budget*); 3) Penyusunan Penetapan Kinerja (*Performance agreement*); 4) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di Biro Organisasi.

Tugas kita selanjutnya adalah mewujudkan rencana kinerja yang tertuang dalam rumusan Renstra ini ke dalam tugas pokok dan kinerja operasional secara terstruktur, terkoordinasi dan akuntabel dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan Biro Organisasi berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah dan Kebijakan dan Staretdgi yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen perencanaan Renstra 2024-2026 Biro Organisasi telah disusun untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan organisasi terhadap pembangunan ke depan, Renstra 2024-2026 Biro Organisasi merupakan RENSTRA transisi, dalam penyusunannya lebih fokus pada ketercapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Demikian atas kerjasama disampaikan terima kasih.

Jayapura, 28 Maret 2024

Kepala Biro,



LINDA.S. ONIBALA, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19720911 199112 2 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	15
1.3 Maksud dan Tujuan	16
1.4 Sistematika Penulisan.....	16

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	18
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah.....	19
2.2.1. Sumber Daya Manusia	20
2.2.2. Keadaan Aset Modal	22
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Biro Organisasi.....	24
2.4.1. Kekuatan	24
2.4.2. k e l e m a h a n	24
2.4.3. Tantangan.....	24
2.4.4. Peluang (Opportunities)	27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	30

3.3. Telaahan Renstra K/L	34
3.4. Penentuan Isu-isu Strategi.....	42
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGGAH PERANGKAT DAERAH.....	58
4.1. Tujuan dan Sasaran	58
 BAB .V STRATEGI DAN ARAH KEBIJKAKAN	
5.1 Strategi.....	66
5.2 Arah Kebijaka.....	66
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	74
6.2 Indikasi Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	74
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	75
 LAMPIRAN :	
IKU BIRO ORGANISASI TA. 2024-2026	
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TA 2019 – 2023 PADA IKU BIRO ORGANISASI DAN PADA RPJMD PROVINSI PAPUA	
INDIKASI KINERJA, PROGRAM PENGELOMPOKAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
RENCANA AKSI BIRO ORGANISASI TA.2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis memuat proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan. Dalam lingkungan organisasi pemerintahan, perencanaan strategis digunakan untuk memberikan arah bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Rencana Strategis Biro Organisasi Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Biro Organisasi untuk periode sampai Gubernur terpilih.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Provinsi Papua perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, dimana sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, periode akhir masa jabatan Gubernur Papua berakhir pada bulan September 2023. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan

Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024, oleh karena itu Peraturan Gubernur tersebut menjadi dasar pijakan OPD dalam penyusunan RENSTRA.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud:

- a. Menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan tahunan di masa transisi menjelang Pilkada;
- b. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Provinsi Papua pada periode tahun 2024-2026;
- c. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Provinsi Papua selama periode tahun 2024-2026;

Sedangkan tujuan dari penyusunan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 adalah :

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan periode tahun 2024-2026 lingkup Perangkat Daerah
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah, Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 disusun berpedoman pada RPJMN 2020-2024, RPJPD 2005-2025, serta RTRW 2013-2033. Selanjutnya RPD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD tahunan. dibawah ini adalah hasil kinerja organisasi sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut



1.	PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	1. UU Nomor 23 Thn 2014 Ttg Pemerintahan Daerah
2.	PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	2. UU Nomor 21 Tahun 2001 Ttg Otsus Bagi Provinsi Papua
3.	PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	3. Peraturan Pemerintah
4.	PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	4. Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
5.	PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA	5. Permendagri Nomor 12
6.	PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI PAPUA	6. Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD
7.	PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PROVINSI PAPUA	7. Permendagri Nomor 9
8.	PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI PAPUA	8. Tahun 2017 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua Dan Papua Barat.S.d.a
9.	PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI PAPUA	
10.	PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA	

	11. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA PROVINSI PAPUA 12. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI PAPUA 13. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI PAPUA 14. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA 15. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA 16. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA 17. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA 18. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI PAPUA 19. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI PAPUA 20. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN	
--	--	--

	PROVINSI PAPUA 21. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA 22. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA 23. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA 24. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI PAPUA 25. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA 26. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA 27. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA 28. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT PROVINSI PAPUA 29. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI PAPUA 30. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA 31. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 35 TAHUN 2024	
--	--	--

	TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA PROVINSI PAPUA 32. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA PROVINSI PAPUA 33. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA ABEPURA PROVINSI PAPUA 34. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA 35. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA 36. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI PAPUA 37. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA 38. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA 39. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA 40. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA 41. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA	
--	---	--

	42. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA 43. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA 44. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA 45. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI PAPUA 46. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA 47. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA 48. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI PAPUA 49. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI PAPUA 50. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA 51. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS ENERGI, SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	
--	--	--

	52. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA 53. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2024 54. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA 55. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA 56. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 57. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA NASKAH DINAS 58. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA 59. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA 60. PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 61. PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA 62. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)BIRO 63. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO ORGANISASI 64. PERJANJIAN KINERJA (PK) 65. LAPKIN BIRO DAN LAPKIN PROVINSI PAPUA	9. PERMENPAN DAN RB Nomor 45 Tahun 2014 Tentang JUKNIS Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
--	--	--

Penyusunan dan Penetapan Regulasi pada Biro Organisasi yang disusun dan ditetapkan merupakan landasan yuridis formal yang strategis untuk pelaksanaan tugas tugas organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Staregis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Tahun 2014-2019, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua adalah :

- 1.3.1.1. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi rencana capaian 2024-2026 melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu;
- 1.3.1.2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua;
- 1.3.1.3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua berdasarkan kerangka pendanaan indikatif;

4.4. Sistematika

Renstra Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur ini memuat rencana program, serta alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) Tahun ke depan dengan Sistematika penyusunan sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN;
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum

		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan;
BAB	II.	GAMBARAN PELAYANAN;
		2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi
		2.2 Sumberdaya perangkat daerah
		2.2.1 Sumberdaya manusia
		2.2.2 Sarana Prasarana
		2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
		2.4 Tantangan dan peluang perangkat daerah.
BAB	III.	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
		3.1 identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah
		3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
		3.2.1 Visi
		3.2.2 Misi
		3.3 Telaah Renstra K/L
		3.4 Penentuan Isu-Isu strategis
BAB	IV.	TUJUAN DAN SASARAN
BAB	V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
BAB	VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB	VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Organisasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, pasal 42 secara kelembagaan Biro Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi :

“merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.

2.1.2. .Struktur Biro Organisasi

(1) Dalam Pasal 28, Susunan Organisasi Biro Organisasi terdiri atas :

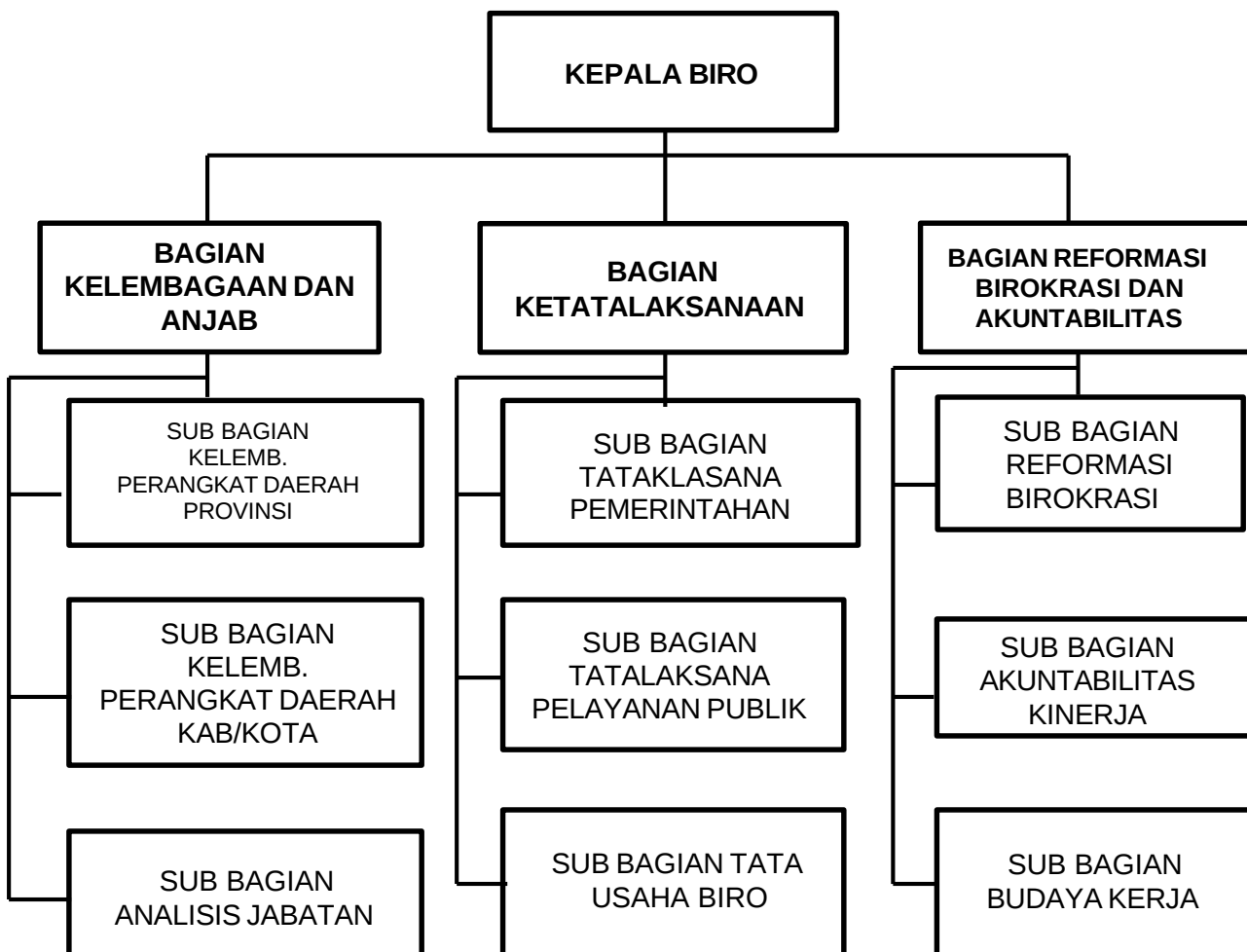
- a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
 2. Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 3. Sub Bagian Analisis Jabatan.
- b. Bagian Ketatalaksanaan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan;
 2. Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- c. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Reformasi Birokrasi;

2. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; dan
3. Sub Bagian Budaya Kerja.

Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagan struktur terlampir.

Bagan Struktur Organisasi tergambar pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1



Biro Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian, yaitu :

1. Kepala Bagian Kelembagaan dan ANJAB;
2. Kepala Bagian Ketatalaksanaan;
3. Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja;

Secara struktural kelembagaan Biro Organisasi berada di bawah koordinasi Asisten Bidang Umum sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi dalam Pasal 42 ayat (2) menyebutkan bahwa :

- a. perumusan program kerja di bidang Organisasi;
- b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- d. pelaksanaan koordinasi di kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi perangkat daerah pada kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang Organisasi yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum.

2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap instansi, karena kinerja pegawai akan menentukan tingkat kinerja dan keberhasilan instansi tersebut. Biro Organisasi memiliki pegawai sejumlah 57 orang, terdiri dari 20 (dua puluh) pegawai laki-laki dan 37 (Lima belas) Pegawai perempuan

pegawai di lingkungan Biro Organisasi dapat dilihat pada tabel 2.2 dan 2.3 dibawah ini

Tabel 2.2 Kualifikasi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah :

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	S2	7	9,28
2	S1	24	51,42
3	D3	-	-
4	SMA	23	40,28
	JUMLAH	57	100

Tabel 2.3 SDM Menurut Eselon :

NO	Tingkat eselon	Jumlah	Jabatan kosong
1	II.b	1	-
2	III.a	3	-
3	IV.a	9	-

Tabel 2.4

Kualifikasi Pegawai berdasarkan
Golongan/Pangkat

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV/c	- orang
2.	Golongan IV/b	1 orang
3.	Golongan IV/a	3 orang
4.	Golongan III/d	7 orang
5.	Golongan III/c	5 orang
6.	Golongan III/b	4 orang
7.	Golongan III/a	6 orang

8.	Golongan II/d	- orang
9.	Golongan II/c	2 orang
10	Golongan II/b	6 orang
11	Golongan II/a	2 orang
TOTAL		57 orang

2.2.2. Keadaan Asset/Modal

Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas bagi aparaturnya di lingkungan Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua terlampir.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Biro Organisasi melaksanakan pelayanan dibidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan analisis dan Formasi Jabatan untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Papua dan memberikan fasilitasi, monitoring dan evaluasi diseluruh Kabupaten/Kota se Papua. Pelayanan yang dilakukan Biro Organisasi TA. 2024-2026 tergambar dalam indikator dan target sebagai ukuran untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan Biro Organisasi, program pada Tahun 2019-2023 sebagai berikut yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Penataan Organisasi

Tahun 2021 telah berlaku SIPD sesuai PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah(SIPD) untuk pengelolaan anggaran yaitu dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dilakukan secara online, perubahan Renstra lebih pada penyesuaian kegiatan, sub kegiatan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan pada SIPD, dengan lebih fokus pada ketercapaian sasaran dan tujuan organisasi, program Biro Organisasi terdiri atas 2 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penataan Organisasi

Pelayanan yang telah dilakukan Biro Organisasi selama tahun 2019-2023 digambarkan dengan capaian kinerja dari indikator-indikator dan target yang ditetapkan sebagai ukuran dalam sasaran Strategis sesuai Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi sebagai berikut dalam Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2019-2023

TERLAMPIR DALAM TABEL 1 DAN TABEL 2

Dari Tabel 2.3 di atas, menunjukan bahwa :

1. Berdasarkan data tersebut diatas rata-rata Biro Organisasi telah menyelesaikan target dari indikator yang ditetapkan dalam RENSTRA Biro, bahkan ada beberapa indikator dapat diselesaikan dan tercapai 100% pada tahun ke-4 RENSTRA begitu pula dengan indikator yang terkait dengan RPJMD telah melewati target dari beberapa indikator dalam RPJMD yaitu 'persentase OPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua serta ada indikator yang belum dapat dicapai yaitu Predikat Penilaian PMPRB Provinsi Papua dan Nilai SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB hal inilah yang perlu ditindaklanjuti Biro Organisasi untuk segera membenahi administrasi dan aparatur serta membangun koordinasi lintas SKPD untuk mencapai target dalam RPJMD Papua

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan Biro Organisasi dalam 3 (tiga) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu:

2.4.1 Kekuatan, merupakan faktor pendorong terlaksananya tugas pelayanan yang berasal dari internal organisasi, yaitu :

1. Adanya visi dan misi serta tujuan organisasi yang jelas (sesuai Visi dan misi pada RPD Papua Tahun 2024-2026)
2. Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing-masing fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
3. Adanya Sumber Daya Aparatur;
4. Adanya Anggaran yang mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Organisasi;
5. Adanya sarana dan prasarana penunjang.

2.4.2 Kelemahan, merupakan faktor penghambat terlaksananya tugas pokok dan fungsi pelayanan organisasi, adapun kelemahan tersebut antara lain

1. Masih adanya PNS yang kurang disiplin;
2. PNS tidak serius dan fokus melaksanakan TUSi
3. Adanya godaan dari internet atas macam-macam aplikasi yang menyesatkan

2.4.3 Tantangan

26

Tantangan yang dihadapi Biro Organisasi adalah :

1. Partisipasi Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi dalam melaksanakan program Pemerintah Daerah;
2. Kompetensi Sumberdaya Aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku;
3. Mengubah pola pikir dan budaya kerja Aparatur Pemerintah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

4. Tuntutan masyarakat agar Pemerintah Daerah mampu memberi pelayanan publik secara baik;

2.4.4 peluang (Opportunities)

1. Komitmen pimpinan untuk mendukung program dan visi misi Pemerintah Daerah.
2. Tuntutan Reformasi Biro Organisasi Organisasi
3. Tuntutan Demokratisasi dan Desentralisasi
4. Tuntutan Akuntabilitas Publik
5. Tuntutan Profesionalisme Penyelenggaraan Bimtek Aparatur.
6. Kewenangan untuk melakukan evaluasi dalam hal penataan kelembagaan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel T-B 35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
3	5	6
1. Belum optimalnya penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan bentuk dan susunan Perangkat Daerah sesuai Peraturan perundang undangan terkait kebijakan perangkat daerah dan otonomi khusus di Papua 2. Adanya TUPOKSI yang tumpang tindih antara Bagian /Sub Bagian pada SKPD dan SKPD Teknis. 3. Belum semua Kab/Kota melakukan koordinasi ke Provinsi(Gubernur) selaku wakil pemerintah pusat tetapi masih koordinasi langsung ke pemerintah Pusat. 4. Adanya beberapa Kab/Kota belum taat asas dalam penentuan perubahan /penetapan PERDA Kabupateb/Kota. 5. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang tidak mengikuti aturan dalam penentuan Perubahan/penetapan PERDA Kabupateb/Kota.	1. Belum optimalnya sinkronisasi kelembagaan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua 2. Pelaksanaan TUPOKSI tidak efisien. 3 Adanya penafsiran yang berbeda-beda tentang pelaksanaan dan perubahan regulasi. 4 Bupati/Walikota belum mengetahui pentingnya tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 5 Pejabat Non Definitif beda menafsirkan antara TUPOKSI Definitif dan Non Definitif	a. Masih ada perangkat daerah provinsi yang susunan organisasinya belum sesuai dengan ketentuan b. Ukuran Organisasi tidak seimbang dengan beban urusan pemerintah yang dilaksanakan c. Tumpang tindih tupoksi antar perangkat daerah 2. Penataan Perangkat Daerah belum dilakukan berdasarkan beban tugas dan kebutuhan. 3. Ukuran organisasi yang tidak sesuai dengan kriteria penataan OPD karena beban kerja sehingga pelaksanaan tugas Perangkat Daerah tidak optimal. 4. Rincian tugas dan fungsi SKPD Provinsi belum mendapat penetapan dari Gubernur Papua 5. Pejabat Bupati/Walikota menenkankan untuk melakukan restruktur organisasi perangkat daerah

6. Sebagian besar SKPD Provinsi belum memahami analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan	6. SDM yang memiliki kompetensi analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan sangat kurang	6. masih rendahnya kesadaran OPD terhadap pentingnya analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan
7. Sebagian besar SKPD Kabupaten/Kota belum memahami analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan	7. SDM yang memiliki kompetensi analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan sangat kurang	7. masih rendahnya kesadaran Kabupaten/Kota terhadap pentingnya analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan
8. Kebutuhan SDM Aparatur	8. Kebutuhan SDM aparatur dalam pelaksanaan TUPOKSI	8. SDMAparatur dalam mendukung pelaksanaan TUPOKSI masih kurang
9. Sebagian besar SKPD Provinsi belum memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang baik.	9. SDM yang memiliki kompetensi analisis jabatan dan analisis beban kerja sangat kurang	9. masih rendahnya kesadaran OPD terhadap pentingnya perencanaan kebutuhan ASN
10. Sebagian besar SKPD Kabupaten/Kota belum memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang baik.	10. SDM yang memiliki kompetensi analisis jabatan dan analisis beban kerja sangat kurang	10. masih rendahnya kesadaran OPD terhadap pentingnya perencanaan kebutuhan ASN
11. (a) Belum semua SKPD memiliki standar pelayanan publik (b) 3(tiga) UPP penyelenggara pelayanan belum optimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik	11. UPP Belum melaksanakan SKM	11. Belum ada komitmen kepala SKPD dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
12. Beberapa SKPD belum memiliki SOP	12. Adanya perubahan regulasi tentang perangkat daerah	12. SOP mikro belum disusun
13. Penggunaan TND belum optimal	13. Kurangnya pemahaman dan penguasaan dalam penggunaan TND	13. ASN belum serius memahami TND
14. Belum semua Pemasangan Papan Nama Pejabat di OPD dilingkup Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan LTD serta UPTD/UPTB Terpasang	14. Tidak adanya keseragaman Penggunaan standarisasi papan nama	14. Penerapan standarisasi belum Optimal

15. Standarisasi penggunaan ruangan bagi pejabat belum dilakukan baik oleh SKPD	15. Adanya pemahaman yang berbeda antara Biro Organisasi yang melaksanakan fungsi koordinasi dan impelentas aturan perundang-undangan dengan Biro Umum selaku pengelola Aset Pemerintah Daerah yang nota bene ikut mengatur penggunaan aset	15. Penerapan standarisasi belum optimal
16. Adanya perubahan regulasi terkait pelaksanaan RB dan Akuntabilitas Kinerja	16. Pemerintah Daerah sulit menyesuaikan diri dengan regulasi yang sering berubah	16. ASN Daerah belum menguasai Regulasi yang baru

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Papua

Visi Provinsi Papua pada RPJPD yaitu **“Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik.”** Dan Misi ke-3 yaitu **“ untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi,** Visi tersebut memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan tahap IV diantaranya tersambung dari segi kemandirian pada segala bidang, dari 4 (empat) Tujuan pada RPD Tahun 2024-2026 tujuan ke 4 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik”** bersinergi dengan Tujuan pada RENSTRA Biro Organisasi yaitu **“Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik”**

Tujuan 4: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua
2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Visi dan Misi serta tujuan diaktualisasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi berpedoman pada tugas pokok dan fungsi organisasi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2023.

Keterkaitan Visi dan Misi pembangunan RPD Provinsi Papua tahun 2024-2026 dengan RENSTRA Biro Organisasi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 36 Telaah Keterkaitan Visi dan Misi pembangunan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 dengan RENSTRA Biro Organisasi

Visi : "Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik."				
No	Misi dan Program Provinsi Papua	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
I	MISI Ke-3			
	untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi,			
	Program : Penataan Organisasi			
1	2	3	4	5
	Program Penataan Organisasi	Belum ada Peraturan Gubernur tentang penyusunan IKU SKPD, Penyusunan LKJ SKPD, dan penetapan perjanjian kinerja bagi Pejabat di Provinsi dan Kab/Kota	1. Dalam proses pengintegrasian SAKIP ke SKPD kurang dukungan masih dari Bappeda 2. Belum semua pejabat memahami SAKIP dengan baik 3. Adanya mutasi Kasubbag Program/ SDM penyusun laporan Partisipasi Kab/Kota belum optimal	1. Pembentukan Tim Kerja lintas SKPD 2. Biro Organisasi terus membangun fasilitas dan komunikasi dalam rangka optimalisasi SAKIP Adanya pelantikan pejabat 3. Adanya komitmen pimpinan di tingkat Provinsi dan Kab/Kota

3	Terwujudnya sistem tatalaksana pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	1. Belum ada Peraturan Gubernur tentang penyusunan SPP, IKM bagi SKPD di Provinsi dan Kab/Kota. Belum ada Peraturan Gubernur tentang SOP pada Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan LTd	1. Partisipasi SKPD dalam memahami SOP, SPP, IKM, Standarisasi Sarana Prasarana Kerja bagi belum optimal 2. Belum ada pedoman petunjuk pelaksanaan pelayanan publik, 4. standarisasi sarana prasarana	1. Sebagai syarat penilaian kinerja dan disiplin ASN di Provinsi Papua membutuhkan Standar Operasional dan Prosedur
4	Penataan kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing)	Belum optimalnya penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan bentuk dan susunan Perangkat Daerah sesuai Peraturan perundang terkait kebijakan perangkat daerah dan otonomi khusus di Papua	Perubahan regulasi di tingkat pusat	- Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan Provinsi Papua - Sudah adanya peraturan tentang pedoman organisasi kelembagaan provinsi dan kabupaten kota - Sudah adanya pedoman kekhususannya dalam perdasus tentang kelembagaan sehingga pemda papua memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menata kelembagaan
5		1. Masih ada Opd yang ukuran organisasinya tidak seimbang dengan beban urusan pemerintahan yang dilaksanakan 2. Belum adanya kelembagaan perangkat daerah khusus yang dibentuk berdasarkan kewenangan khusus provinsi papua 3. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan terhadap perangkat daerah Kab./Kota mencakup struktur organisasi serta tugas pokoknya perlu belum maksimal	1. Penataan Kelembagaan belum dilakukan berdasarkan beban tugas dan kebutuhan 2. Pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal 3. Adanya beberapa Kab/Kota yang tidak berkoordinasi melakukan fasilitas ke Provinsi terkait penataan kelembagaan	1. Sudah adanya berbagai peraturan yang mengatur tentang penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi dan kab./kota 2. Sudah ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah 3. Kab./Kota telah memahami mengenai prosedur fasilitasi penataan kelembagaan ke provinsi

6	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang Kompeten dan proporsional	Penempatan SDM pada OPD belum berpedoman pada Analisis Jabatan	Partisipasi SKPD dalam memahami ANJAB, ABK, Evaluasi jabatan belum optimal	1. Telah disusun Dokumen Analisis Jabatan pada semua OPD 2. Dibutuhkan adanya komitmen Kepala Daerah dalam hal peningkatan kompetensi SDM Aparatur
		Belum ada Peraturan Gubernur tentang Penyusunan ANJAB, ABK dan Evaluasi Jabatan bagi SKPD Provinsi dan Kab/Kota	1. Partisipasi SKPD dalam memahami ANJAB, ABK, Formasi Jabatan, Evaluasi jabatan belum optimal 2. Belum ada pedoman petunjuk pelaksanaan penyusunan Anjab, ABK dan Formas Jabatan	1. Adanya dukungan dari Pemendagri dan Kementerian PAN dan RB terkait fasilitas regulasi ke daerah 2. Adanya komitmen pimpinan di Kab /Kota Sebagai syarat penilaian kinerja dan disiplin ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan ANJAB dan SOP 3. Adanya reviuw dari Inspektorat Provinsidan BPK.RI

3.3. Telaahan Renstra ,

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas organisasi, Biro Organisasi melaksanakan visi dan misi pemerintah daerah sesuai Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua, telaah RENSTRA Biro dengan RPD Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

Misi ke-3 yaitu “ **untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi**

Tabel. 37

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA TA. 2024-2026	RENSTRA BIRO ORGANISASI TA 2024-2026	RENSTRA KEMENPANRB 2020-2024
VISI : “ Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik. ”		Visi : “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan”
MISI ke-3 “ untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi	Misi : 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Analisis Jabatan mewujudkan organisasi Pemerintah daerah yang rasional. 2. Meningkatkan pembinaan Sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektif. 3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur	MISI : 1. . Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, 2. Lincih, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy. 3. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel 4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas. 5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani. 6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.bermartabat, dan terpercaya

PRIORITAS		
Prioritas difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.	1. Kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai ABK 2. Tatalaksana pemerintahan yang efisiensi , efektif, responsif, transparan dan akuntabel 3. Penempatan, Pengembangan dan pengendalian aparatur yang berorientasi pada ANJAB dan bermuara pada penerapan sistem merit	Mewujudkan Integritas, profesional dan akuntabel, melayani kolaboratif, informatif dan kesempurnaan/komitmen pada kualitas
TUJUAN “		
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Terwujudnya Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing 2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang Berkualitas dan Kapabel

2. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua 3. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 5. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		3. Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsive, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi 4. Terwujudnya ASN yang professional, berintegritas, dan sejahtera 5. Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel 6. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas 7. Terwujudnya kualitas pelayanan public yang prima 8. Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional 9. Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien 10. Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang professional, berintegritas, dan sejahtera 11. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi, dan akuntabel 12. Terwujudnya kualitas pelayanan public Kementerian PANRB yang prima
--	--	---

1. Arah Kebijakan Tahun 2024 Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2024 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan Arah Kebijakan Tahun 2025 Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2025 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Percepatan Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Arah Kebijakan Tahun 2026 Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2026 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif Melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien, efektif dan akuntabilitas	1 Reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan 2 Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit 3 Peningkatan kualitas implementasi SAKIP 4 Penguatan pengawasan 5 Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan public 6 Peningkatan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi
--	---	---

STRATEGI 1. Meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperbaiki prosedur kerja (business process) 2. Mengarusutamakan inovasi dalam pelayanan publik bersifat lintas sektor 3. Perluasan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis e government	1 Melakukan pertemuan/clinick dan menyebarluaskan kuisiонер, dan melakukan pengumpulan data 2 Membentuk Tim penilaian kinerja pelayanan publik lintas OPD serta melakukan penilaian/pemeringkatan kinerja kepada OPD 3 Mengikutsertakan dalam bimtek sesuai TUSI 4 Melakukan koordinasi dengan OPD yang akan dipasang papan nama jabatan 5 Membuat SK. Gubernur tentang pembangian ruangan bagi OPD 6 Membentuk Tim Kerja dengan SK. Gubernur 7 Melakukan koordinasi intens dengan OPD terkait ketersediaan data LKj 8 Melakukan koordinasi intens dengan Kemendagri dan Kemenpan dan RB terkait peningkatan nilai kinerja	1 Penetapan Road Map RB 2015-2019 dan Juklak RB 2 Penetapan Undang-Undang Tentang Organisasi Pemerintah dan Grand Design Organisasi Pemerintah 3 pengendalian pengembangan sistem e- Gov dan pengadaan infrastruktur e- Gov oleh K/L/pemda 4 Penyusunan standar kompetensi jabatan bagi setiap jabatan aparatur sipil negara. 5 Penerapan pengadaan dengan sistem CAT untuk seleksi CPNS dan PPPK di K/L/pemda 6 Penguatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi K/L/Pemda. 7 Penguatan Nilai-Nilai dasar, Nilai Kode Etik dan Kode Perilaku ASN 8 Penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); 9 Penguatan monev kinerja pelayanan publik oleh Kem PAN dan RB
PROGRAM		
Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggara Pemerintahandan Pembangunan	Penguatan kapasitas Kelembagaan Penataan Organisasi(b	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kementrian PANRB telah merumuskan visi tahun 2020-2024 yaitu “Mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi untuk mencapai pemerintahan yang berkelas dunia “. Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementrian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang profesional dalam melaksanakan tugasnya serta memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya, demikian halnya dengan Biro Organisasi yang mengembang visi dan

misi pemerintah daerah yang lebih mengedepankan pelayanan administrasi dan pembangunan SDM sebagai aktualisasi dari implementasi regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan keterkaitan dengan RPD Provinsi Papua nampak pada prioritas pelaksanaan visi dan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program yang dilaksanakan, hal ini memberi konsekwensi bahwa Biro organisasi harus mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan sehingga perencanaan dari Tahun pertama sampai tahun ke 2 ada progres capaian yang signifikan.

Tabel 38

Permasalahan Pelayanan Biro Organisasi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SK PD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Papua	Belum ada Peraturan Gubernur tentang penyusunan IKU SKPD Penyusunan LKj SKPD, dan penetapan perjanjian kinerja bagi Pejabat di Provinsi dan Kab/Kota	1. Dalam proses pengintegrasian SAKIP ke SKPD masih kurang dukungan dari Bapperida. 2. Belum semua pejabat memahami SAKIP dengan baik 3. Adanya mutasi Kasubbag program/SDM penyusunan laporan 4. Partisipasi Kab/Kota belum optimal	1. Pembentukan Tim Kerja lintas SKPD 2. Biro Organisasi terus membangun fasilitas dan komunikasi dalam rangka optimalisasi SAKIP 3. Adanya pelantikan pejabat 4. Adanya komitmen pimpinan di Kab/Kota

2	Terwujudnya penataan aparatur kompeten proporsional SDM yang dan	Penempatan SDM pada OPD belum berpedoman pada Analisis Jabatan	Partisipasi SKPD dalam memahami ANJAB ABK, Evaluasi jabatan belum optimal	4. Telah disusun Dokumen Analisis Jabatan pada semua OPD 5. Dibutuhkan adanya komitmen Kepala Daerah dalam hal peningkatan kompetensi SDM Aparatur 6. Adanya dukungan dari Kemendagri dan Kementerian PAN dan RB terkait fasilitas regulasi ke daerah 7. Adanya komitmen pimpinan di Kab/Kota 8. Sebagai syarat penilaian kinerja dari disiplin ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan ANJAB dan SOP 9. Adanya review dari Inspektorat Provinsi dan BPK.RI
3	Terwujudnya sistem tatalaksana pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	1. Belum ada Peraturan Gubernur tentang penyusunan SPP, IKM bagi SKPD di Provinsi dan Kab/Kota	1. Partisipasi SKPD dalam memahami SOP, SPP, IKM, Standarisasi Sarana Prasarana Kerja bagi belum optimal 2. Belum ada pedoman petunjuk pelaksanaan pelayanan publik, standarisasi sarana prasarana	1. Sebagai syarat penilaian kinerja terhadap standar pelayanan

4	Penataan kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing)	4. Masih ada Opd yang ukuran organisasinya tidak seimbang dengan beban urusan pemerintahan yang dilaksanakan 5. Belum adanya kelembagaan perangkat daerah khusus yang dibentuk berdasarkan kewenangan khusus provinsi papua 6. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan terhadap perangkat daerah Kab./Kota mencakup struktur organisasi serta tugas pokoknya perlu belum maksimal	4. Penataan Kelembagaan belum dilakukan berdasarkan beban tugas dan kebutuhan 5. Pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal mendorong terwujudnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Adanya beberapa Kab/Kota yang tidak berkoordinasi melakukan fasilitasi ke Provinsi terkait penataan kelembagaan	1. Sudah adanya berbagai peraturan yang mengatur tentang penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi dan kab./kota 2. Sudah ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah 3. Kab./Kota telah memahami mengenai prosedur fasilitasi penataan kelembagaan ke provinsi
5	Terwujudnya sistem tatalaksana pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	1. Belum semua SKPD yang menyusun peta proses bisnis 2. Belum semua SKPD memahami standarisasi sarana prasarana	3. Partisipasi SKPD dalam memahami Standarisasi Sarana Prasarana Kerja dan peta proses bisnis belum optimal	4. Sebagai standart dalam pengadaan sarana prasara kerja ASN 5.
6	Terwujudnya penyusunan SOP dilingkungan	3. Belum ada Peraruran Gubernur tentang SOP pada Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Ltd	6. Partisipasi SKPD dalam memahami SOP dan bagi belum optimal penggunaan SOP dilingkungan kerja	7. Sebagai standar dalam penilaian kinerja dan disiplinASN di Provinsi Papua membutuhkan Stantard Operasional dan Prosedur

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka isu-isu strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua untuk periode 2 (dua) tahun kedepan dapat dikelompokkan kedalam 7 (tujuh) kelompok isu strategis sebagai berikut:

1. ***Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:***

“Salah satu tugas Biro Organisasi antara lain untuk menyiapkan bahan kebijakan penataan desain struktur tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mendasarkan pada keseimbangan beban kerja sehingga tidak terjadi duplikasi maupun kekosongan penyelenggaraan tugas fungsi.

“Penataan birokrasi pemerintah daerah yang menjadi isu sentral saat ini adalah perlunya reformasi birokrasi dalam pengelolaan pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata masing-masing daerah. Keberadaan organisasi perangkat daerah untuk mengakomodir kewenangan daerah dengan prinsip miskin struktur kaya fungsi akan membentuk konfigurasi besar. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien.

Kondisi riil di daerah yang masih relevan saat ini terkait kelembagaan di daerah bahwa adalah belum dilaksanakan penyesuaian peraturan terkait pelaksanaan pemerintahan baik di pemerintah pusat dan pemerintahan di papua, dimana yang diharapkan pemerintah pusat agar dilaksanakan penyetaraan jabatan serta penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan belum dilaksanakan di provinsi papua, hal ini mengakibatkan kelembagaan di Provinsi Papua masih sangat besar sehingga regulasi yang dikeluarkan dari pemerintah pusat belum dapat diterapkan dengan baik di provinsi bahkan kabupaten kota di Papua.

2. **Kewenangan Kekhususan**

Kewenangan kekhususan Provinsi Papua sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan Daerah Provinsi Papua sesuai undang undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sehingga diperlukan penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai salah satu kekhususan tersebut;

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksana Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Pemerintah Provinsi Papua telah mengakomodirnya dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perdasus ini mengaktualisasikan kekhususnya dalam kelembagaan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di papua, hal ini ditindaklanjuti dengan disusunnya Perda dan Perbup/Perwal di Kabupaten Kota pada tahun yang sama tentang kelembagaan perangkat Daerah dan kelurahan, Pengaturan kelembagaan yang melaksanakan urusan kekhususan dimaksudkan sebagai dasar bagi perangkat daerah di Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota yang mengawal dan memastikan urusan Kelembagaan Pemda Provinsi Papua dapat menjadi salah satu alat dalam memberikan kontribusi pembangunan bagi masyarakat di tanah Papua.

3. **Fasilitasi penataan kelembagaan Kabupaten /Kota**

Terbentuknya organisasi perangkat daerah di Kab / Kota sesuai dengan besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah,

cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria, pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan.

Berdasarkan identifikasi Tabel T-B 35 Pemetaan Permasalahan Untuk penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah diatas, Penataan kelembagaan Perangkat daerah Kabupaten Kota Sebagai Berikut :

4. Tumpang Tindihnya Urusan Pada SKPD

Dalam hal melakukan penataan kelembagaan di wilayah provinsi papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perangkat Daerah beserta turunannya peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengakomodir penataan kelembagaan perangkat daerah, menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan karakteristik di daerahnya. Pada umumnya kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota dibentuk untuk melaksanakan tugas yang berdasarkan pemetaan urusan yang dibuat Pada peraturan pemerintah ini. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat di beberapa Kabupaten/kota yang mempunyai kemiripan nama bagian atau sub bagian, sehingga mengambil alih fungsi atau tugas dari dinas/badan yang mempunyai tugas teknis tersebut. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya ketidaksesuaian dan keselarasan Urusan tugas / Tupoksi antara SKPD. Di masing-masing Kabupaten/Kota.

5. Koordinasi **Pemerintah** Kabupaten/Kota pada Pemerintah Pusat Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas membina, memfasilitasi kabupaten/kota yang berada dalam cakupan wilayah pemerintahannya dalam melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah agar Kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria, pembentukan suatu organisasi perangkat daerah untuk ditetapkan

6. **Penataan SDM aparatur yang kompeten dan proporsional**

Analisa beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang petugas.

Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai, atau dapat pula dikemukakan bahwa analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu.

Dengan cara membagi isi pekerjaan yang mesti diselesaikan oleh hasil kerja rata-rata satu orang, maka akan memperoleh waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan pekerjaan tersebut. Atau akan memperoleh jumlah pegawai yang dibutuhkan melalui jumlah jam kerja

setiap pegawai tersebut.

Dalam manajemen kepegawaian, kegiatan penerimaan dan penempatan pegawai mutlak harus dilakukan didalam satu unit organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Kegiatan manajemen kepegawaian adalah kegiatan untuk mendapatkan landasan guna penerimaan dan penempatan pegawai yang pada awalnya dilakukan terlebih dahulu melalui analisis jabatan (job analysis) yang berpedoman pada PERMENPAN RB Nomor 11 /2024 tentang Jabatan Pelaksana dilingkungan Instansi Pemerintah, yang berarti suatu kegiatan untuk memberikan gambaran tentang syarat-syarat jabatan (job specification) yang diperlukan bagi setiap pegawai yang akan diterima dalam menduduki suatu jabatan didalam suatu organisasi.

Perencanaan kebutuhan pegawai suatu instansi mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang tepat baik jumlah dan waktu, maupun kualitas baik kuantitatif maupun kualitatif yang dirinci menurut jabatan dan unit kerja. Dengan demikian perencanaan, perekrutan, penempatan dapat dilakukan sesuai kompetensi dan proporsional. kebutuhan ANJAB dan ABK serta Evaluasi sangat dibutuhkan bahkan menjadi dasar penilaian tambahan penghasilan bersyarat bagi ASN. kedepan besaran tunjangan kinerja akan dihitung sesuai dengan kelas jabatan (job grade). Kelas jabatan untuk masing-masing jabatan struktural ataupun fungsional disusun berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang dilakukan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan. Jabatan yang dievaluasi adalah jabatan-jabatan sesuai hasil Analisis Jabatan dengan beberapa faktor penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing.

7. Meningkatkan **Kualitas Pelayanan Publik**;

Pelayanan publik menjadi wacana menarik dewasa ini. Yang dibicarakan berkisar dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak, semakin beragamnya produk pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara negara hingga derasnya arus pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik. Tak pelak lagi, inilah salah satu perkembangan luar biasa dalam dinamika pembangunan di wilayah Papua. Dari sudut pandang penyelenggara pelayanan publik, ada keinginan memperkaya ragam pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat, pun tak lupa senantiasa ditingkatkan kualitasnya. Berbagai upaya penyederhanaan prosedur, pemangkasan waktu pelayanan dan peningkatan efisiensi biaya pelayanan terus-menerus disempurnakan oleh setiap unit penyelenggara pelayanan.

Peningkatan semangat melayani masyarakat juga dibarengi dengan makin terbukanya pola pikir Pemerintah dalam pelibatan masyarakat guna merumuskan perbaikan proses pelayanan. Keterbukaan ini masih ditambah dengan kesediaan menerima dan mengelola keluhan masyarakat yang merupakan umpan balik penyempurnaan proses pelayanan publik. Pelayanan publik, sebagaimana tertuang dalam UU 25/2009, dimaknai sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang ini mewajibkan negara memberikan pelayanan publik bagi setiap warga negara.

Menindaklanjuti undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Peraturan Gubernur terkait hal tersebut. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Ini berarti, negara berkewajiban dan bertanggungjawab atas pemenuhan hak dan

kebutuhan dasar masyarakatnya demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Ada kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara lain:

1. Standar Pelayanan, Pemerintah perlu menetapkan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan publik. Hal ini mencakup waktu layanan, kualitas layanan, dan aspek lain yang memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang memadai.
2. Survei Kepuasan Masyarakat, Survei secara berkala harus dilaksanakan untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan. Hasil survei ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan atau peningkatan layanan jika diperlukan
3. Forum Konsultasi Publik, Forum ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan layanan publik. Forum Ini penting dilaksanakan untuk melihat sejauh mana peran serta masyarakat terkait aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam kaitannya terhadap pelayanan publik. Forum ini bisa meliputi pertemuan langsung, diskusi daring, atau mekanisme lain yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, masukan, atau keluhan mereka

Ketiga kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penyelenggara layanan publik khususnya perangkat daerah telah mencapai tujuan mereka dan seberapa baik mereka telah memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat terlihat melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota di

Wilayah Papua.

Tujuan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur.

Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Upaya penataan Tata Laksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dilakukan dalam beberapa kegiatan:

1. Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Tata Naskah Dinas
2. Penyusunan Peraturan Gubernur Papua tentang Pakaian Dinas
3. Penyusunan Peta Proses Bisnis
4. Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
5. Peningkatan Penataan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan tentang cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah daerah. Lima kegiatan tersebut di atas merupakan komponen penting dalam tata laksana pemerintahan.

8. Peningkatan Tata Laksana Pemerintahan

Standar Operasional Prosedur (SOP) bisa diartikan sebagai suatu petunjuk organisatoris yang menetapkan suatu tindakan baku. SOP berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh

pekerja/petugas dalam melakukan/menyelenggarakan pekerjaan mereka. Dalam pemerintahan, penerapan SOP merupakan sebuah keharusan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam hal pemerintahan, SOP bermanfaat untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat. Penerapan SOP dalam pelayanan pemerintahan perlu diperhatikan antara struktur organisasi dan pembagian tugas dalam pemerintahan serta dikaitkan dengan beberapa hal penting dalam penerapan SOP, yakni: efisiensi, konsistensi, minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja (pegawai), peta kerja dan batasan pertahanan.

9. Isu strategis reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja

Isu Strategis dari Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (Bagian RBA) pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua adalah “PENGUATAN KAPASITAS”. Penguatan Kapasitas kepada Sumber Daya Manusia yang melakukan Tupoksi nya maupun juga Penguatan Kapasitas secara Kelembagaan yang melukan Tusi Organisasi nya.

Penguatan Kapasitas dilakukan bagi Konstituen yaitu Penerima Layanan/Penerima Manfaat dari Bagian RBA yaitu :

1. SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan
2. Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

Kedua Konstituen diatas merupakan Penerima Layanan/Penerima Manfaat dari apa yang dilakukan oleh Bagian RBA secara konstinue setiap Tahun dan berkelanjutan.

Penguatan Kapasitas yang dilakukan setiap tahun oleh Bagian RBA melalui 3 Hal yaitu :

1) Pembinaan

Pembinaan yang sering dilakukan oleh Bagian RBA setiap tahun adalah mensosialisasikan berbagai aturan yang terkait dengan Tupoksi di Bagian RBA. Proses Sosialisasi ini dilakukan secara kontinue dan berkelanjutan agar terdapat pemahaman yang baik bagi Konstituen Bagian RBA.

2) Pendampingan

Setelah dilakukan Pembinaan mereka dapat melaksanakan berbagai aturan yang telah di sosialisasikan dalam Tupoksi mereka masing-masing.

3) Monitoring dan Evaluasi (Monev).

Setelah Konstituen diberikan Pembinaan dan Pendampingan maka selanjutnya Bagian RBA akan melakukan tahapan selanjutnya yaitu melakukan Monev dari apa yang sudah diberikan lewat pembinaan dan Pendampingan seperti salah satunya yaitu Rencana Tindak Lanjut (RTL). Dengan adanya RTL tersebut maka proses-proses Penguatan Kapasitas akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan Konstituen.

Berikut adalah Proses Penguatan Kapasitas pada Sub Bagian Reformasi Birokrasi, Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja serta Sub Bagian Budaya Kerja.

4) Reformasi Birokrasi

Beberapa Isu Strategis dalam perjalanan Reformasi Birokrasi pada periode ketiga (2020-2024) sesuai dengan Peraturan Kementerian PANRB RI Nomor 3 Tahun 2023 yaitu Perubahan atas PERMENPANRB Nomor 25/2020 tentang Road Map RB Tahun 2020-

2024 yaitu seputar 21 Indikator dalam RB General yaitu :

1. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
2. Indeks SPBE
3. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
4. Indeks Perencanaan Pembangunan
5. Nilai SAKIP
6. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
7. Tingkat Maturitas SPIP
8. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan
9. Survei Penilaian Integritas (SPI)
10. Indeks Kualitas Kebijakan
11. Indeks Reformasi Hukum
12. Tingkat Digitalisasi Arsip
13. Indeks Pembangunan Statistik
14. Indeks Tata Kelola Pengadaan
15. Opini BPK
16. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
17. Indeks Sistem Merit
18. Indeks BerAkhlak
19. Survei Kepuasan Masyarakat
20. Indeks Pelayanan Publik
21. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
22. Juga RB Tematik yaitu
23. Pengentasan Kemiskinan
24. Realisasi Investasi
25. Digitalisasi Pemerintahan (Stunting)
26. Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
27. Pengendalian Inflasi

Reformasi General dan Reformasi B Tematik ini dikawal setiap Tahun oleh Pemerintah Daerah dan di Laporkan pelaksanaannya kepada Pemerintah melalui KEMENPANRB RI yaitu pada portal Reformasi Birokrasi Nasional PANRB yaitu www.portalrb.id

Indeks Reformasi Birokrasi juga masuk dalam penentuan besaran TPP (Tunjangan Kinerja ASN) yang dimasukkan dalam aplikasi Kemenadgri yaitu Simona. Indeks Reformasi Birokrasi sebagai salah satu Penilaian dalam Tata Kelola Pemerintahan.

5) Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, terdapat beberapa hal yang menunjukan akuntabilitas kinerja masih lemah, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten, diantaranya:

1. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar, terutama di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
2. Adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang akuntabilitas kinerja yang kurang selaras;
3. Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
4. Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh instansi pemerintah tentang kebijakan di bidang akuntabilitas;
5. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah serta;
6. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran.

Untuk strategi ke depan dilaksanakan melalui:

1. Menyusun dan mendorong penyusunan Peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas Kinerja;
2. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP;
3. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja instansi pemerintah serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP;
4. Mendorong pengembangan model percontohan yaitu suatu pemerintah daerah/wilayah yang dijadikan model penerapan prinsip good governance sehingga wilayah tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta dapat dijadikan model/contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemda kepada Pemerintah melalui KEMENPANRB RI yaitu pada aplikasi e-SAKIP Reviu (ESR). Pelaporan Kinerja Pemda ini di Laporkan setiap Awal tahun sesudah Tahun Anggaran yang lama berakhir. Pelaporan Kinerja ini yang sering kita sebut LAKIP juga LKJiP namun tetap sama Laporan nya karena masih menggunakan Dasar Hukum yang sama untuk Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja yaitu PERMENPANRB RI No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemda menjadi pintu masuk dalam menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui SAKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Komponen SAKIP

ada 4 (Empat) yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja, sehingga salah satu komponen penting yang di ukur untuk melihat jalannya SAKIP dalam Pemda adalah melalui Pelaporan Kinerja yang sering kita sebut LAKIP/LKj/LKjIP).

6) Budaya Kerja

Budaya Kerja merupakan Nilai-Nilai yang dianut dalam sebuah wadah/organisasi/perkumpulan. Nilai-Nilai tersebut menjadi pengikat untuk semua manusia dalam wadah/organisasi/perkumpulan dalam menjalankan Tusi wadah/organisasi/perkumpulan nya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Papua maka telah ada Nilai-Nilai yang dianut bagi Pemerintah Provinsi Papua yang didalam nya berisikan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjalankan Nilai-Nilai Budaya Kerja yaitu “BerAKHLAK”

Berorientasi Pelayanan : yaitu Komitmen memberikan Pelayanan Prima demi Kepuasan Masyarakat

Akuntabel : Bertanggungjawab atas Kepercayaan yang diberikan

Kompeten : yaitu Terus Belajar dan mengembangkan Kapabilitas

Harmonis : yaitu Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan

Loyal : yaitu Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggunakan serta menghadapi perubahan

Kolaboratif : yaitu Membangun kerjasama yang sinergis.

Peraturan Gubernur Nomor 41/2023 tersebut baru tersusun di Tahun 2023, jadi di Tahun 2024 hingga Tahun 2025 lebih kepada Sosialisasi kepada Konstituen/Penerima Layanan/Penerima Manfaat dari Pergub ini yaitu ASN di tiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua juga bagi Kabupaten/Kota se Provinsi Papua melalui Bagian Organisasi nya.

Sub Bagian Budaya Kerja juga membuat arah kebijakan Budaya Kerja dalam bentuk Penyusunan Road Map Budaya Kerja sehingga menjadi Pijakan Bersama bagi Provinsi Papua dalam implemtasi Budaya Kerja.

Harapan dari semua nya adalah terciptanya Budaya Birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang Profesional yang ditandai oleh peningkatan Nilai Budaya Kerja oleh Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB RI yaitu terkait dengan 2 Indikator yaitu Nilai Survei Employer dan Nilai Survei Indeks berAKHLAK yang di nilai setiap Tahun dan masuk dalam kategori Indeks Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Provinsi Papua.

Demikian Isu-Isu Strategis yang dilakukan oleh Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (Bagian RBA) pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.

Bila dikaitkan dengan isu strategis Pemerintah Provinsi Papua ada keterkaitan yaitu pada point 5 melalui penyelarasan dan pertimbangan, telah dimusukan 6 isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Papua tahun 2024 – 2026, yaitu sebagai berikut.

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi);
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur
3. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten
4. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
5. Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik.

isu strategis ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi yang harus dijawab, dalam melaksanakan fungsi administrasi dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya manusia aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis juga menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan RENSTRA yang mempunyai target, sasaran yang harus dicapai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan

Tujuan Biro Organisasi yang akan dicapai untuk masa waktu pembangunan 2024-2026 adalah “Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik” perumusan tujuan menggambarkan pada beberapa sasaran akan dicapai. Pencapaian tujuan selaras dan bersinergi dengan RPD Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2005-2025.

Visi Provinsi Papua pada RPJPD yaitu **“Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik.”** Dan Misi ke-3 yaitu **“ untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi,** Visi tersebut memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan tahap IV diantaranya tersambung dari segi kemandirian pada segala bidang, dari 4 (empat) Tujuan pada RPD Tahun 2024-2026 tujuan ke 4 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik”** bersinergi dengan Tujuan pada RENSTRA Biro Organisasi yaitu **“Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik”**

Tujuan 4: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua
2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Visi dan Misi serta tujuan diaktualisasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi berpedoman pada tugas pokok dan fungsi organisasi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2023.

Untuk mendukung Visi Misi pembangunan Provinsi Papua, Biro

Organisasi merumuskan tujuan yakni **“Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik”** Tujuan Biro Organisasi diatas dijabarkan pada sasaran-sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang bersinergi dengan RPD Provinsi Papua, yaitu terdiri atas 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Biro Organisasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang RPD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode 2023	Taarget Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2026
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67	75,05	80,05	80.50	80.50
2	Nilai SAKIP	Nilai	66,05	75,39	80,05	80,50	80,50
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	95	95	95	95	95

Adapun keterkaitan Tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan Biro Organisasi dapat dilihat pada Tabel..... berikut :

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARANSTRATEGIS	INDIKATORKINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai ABK	Penataan kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	100	100	100
2				Jumlah PERDA dan PERGUB di Bidang Kelembagaan	15 PERGUB	1 PERDA, 40 PERGUB	30 PERGUB
3				Presentase kelembagaan Kabupaten/kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	50%	70%	100%
4				Presentase rekomendasi kelembagaan yang Ditindaklanjuti	30%	60%	100%
5				Cakupan Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota	100%	100%	100%

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATORKINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Persentase Tatalaksana pemerintahan yang efisiensi , efektif, responsif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SPP	20	50	100
7				Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SPP	20	50	100
8				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi			
				Hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik	B-	B	A-
9				Persentase UPP yang mendapat penilaian pelayanan baik	100	100	100
				Persentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP	100	100	100
10			Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kabupaten /Kota yang prima	Persentase dokumen pelayanan Publik	100	100	100
11				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten/Kota	30	60	100
12				Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SPP	100	100	100
13				Evaluasi Intern dan Ekstern SPP	C	C	B
14				Persentase SKPD yang mendapat penilaian indeks pelayanan baik	50	70	100
15			Meningkatnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang	Persentase SKPD yang memahami penggunaan Tata Naskah Dinas yang benar	100	100	100
16				Persentase SKPD yang melaksanakan Tata Naskah Dinas yang benar	100	100	100

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATORKINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Persentase Tatalaksana pemerintahan yang efisiensi , efektif, responsif, transparan dan akuntabel	Terwujudnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	Persentase SKPD Provinsi yang menyusun Peta Proses Bisnis Provinsi Papua	-	100	100
18				Penyusunan Pola Hubungan Kerja Antar SKPD berbasis Pola Kerja Terpadu	100	100	100
19				Pendampingan dan Monev implementasi Pola Hubungan Kerja Antar SKPD	-	-	-
20				Penyusunan PERGUB TND Elektronik	-	-	-
21			Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK Gubernur	-	100	100
22				Persentase SKPD yang memiliki SOP yang sesuai dengan Tugas Pokok dan /Fungsi	-	100	100
23				Jumlah SKPD yang di evaluasi penerapan SOP-nya	15 SKPD	10 SKPD	15 SKPD
24				Persentase SKPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama	-	100	100
25				Meningkatnya pelaksanaan budaya kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Papua	Persentase SKPD yang Provinsi yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja	100	100
			Persentase Kab/Kota yang mendapat Sosialisasi Budaya Kerja		20	60	100

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Persentase Tatalaksana pemerintahan yang efisiensi, efektif, responsif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah Papan nama pejabat struktural yang terpasang	-	799	-
26				Persentase sarana dan prasarana kerja sesuai dengan standarisasi	-	100	100
27				Persentase OPD yang menempati ruangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	100	100
28				pesertase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan	100	100	100
29				Pendampingan dan Monev Implementasi Standarisasi Sarana dan Prasarana	-	40 OPD	40 OPD
30			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI	B	B	B
31				Presentase SKPD Provinsi yang menggumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	100	100	100
32				Presentase Kab/Kota yang menggumpulkan melaporkan LKj/Lakip	20	40	60
33				Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua	100	100	100
34			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	A	A	A

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
35	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Persentase Tatalaksana pemerintahan yang efisiensi , efektif, responsif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	10	18	42
36				Predikat Penilaian PMPRB Provinsi Papua	CC	B	BB
37				Jumlah Dokumen RoadMap RB Pemerintah Provinsi Papua	1 Dokumen	-	-
38				Persentase Kab/Kota dapat melaporkan PMPRB	-	10	30
39				Persentase Kab/Kota yang mendapat predikat baik sesuai evaluasi PMPRB dari KemenPANRB	-	10	30
40		Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai ABK	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Ruip)	-	40	20
41				Persentase Penganalisis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	-	100	100
42				Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan	100	100	100
43				Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua	100	100	100
44				Persentase penganalisis Standar Kompetensi Jabatan pada SKPD Provinsi	25	50	25

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai ABK	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua	-	100	100
46				persentase penganalisis formasi jabatan pada SKPD di Provinsi Papua	-	100	100
47				Cakupan OPD Provinsi yang sudah dilakukan evaluasi jabatan	100	100	100
48				Persentase SKPD Provinsi yang memiliki standar kompetensi jabatan	-	100	100
49				Persentase penganalisis evaluasi jabatan pada SKPD di Provinsi Papua	-	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun **strategi** yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.

3.2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi Organisasi.

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2024-2026, sebagai berikut :

Tabel 5.1 Hubungan antara , Tujuan dengan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan

NO.	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitasi Penataan kelembagaan Provinsi Papua	Penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	1. Penyederhanaan Struktur organisasi sesuai kebutuhan daerah 2. melakukan pembinaan melalui pertemuan/rapat teknis penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan akuntabilitas
			Persentase PERDA dan PERGUB di Bidang Kelembagaan		
2	Fasilitasi Pembinaan kelembagaan perangkat daerah Kab/kota se Papua		Presentase kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten/kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran		
3	Rapat kerja pembinaan kelembagaan Kab/Kota se Papua		Presentase kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan		
4	Rapat koordinasi teknis bidang organisasi se Provinsi Papua		Presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti		
5	Sosialisasi PERDA tentang Organisasi dan Tatakerja Kelembagaan Perekda dan PERGUB tentang Rincian tugas dan fungsi unit kerja		Persentase jumlah ASN yang memahami pelaksanaan TUPOKSI		
6	Monitoring dan evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota		

NO.	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
7	Fasilitasi peningkatan pelayanan publik (Sub Kegiatan)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	1. Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SKM 2. Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SPP 3. Fasilitasi evaluasi Eksternal SPP 4. Persentase SKPD yang mendapat penilaian pelayanan baik 5. Persentase Dokumen Pelayanan Publik	1. Melakukan pertemuan/clinick dan menyebarluaskan kuisiner, dan melakukan pengumpulan data 2. Membentuk Tim penilaian kinerja pelayanan publik lintas OPD serta melakukan penilaian/pemeringkatan kinerja kepada OPD	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien, efektif dan akuntabilitas
		Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kabupaten/Kota yang prima	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten/Kota 2. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SPP 3. Evaluasi Intern dan Ekstern SPP 4. Persentase SKPD yang mendapat penilaian indeks pelayanan baik		
8	Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Meningkatnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	1. Persentase SKPD yang memahami penggunaan Tata Naskah Dinas yang benar 2. Persentase SKPD yang melaksanakan Tata Naskah Dinas yang benar		
9	Sosialisasi SPP, FKP dan SKM bagi Pejabat di Provinsi Papua		3. Nilai hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
10	Penyusunan data kompetensi SDA dilingkungan pemerintah Prov Papua		4. Persentase data kompetensi SDA 5. Persentase data dalam web site Biro		

No	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
11	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (Sub Kegiatan) Pengelolaan Tatalaksana	Terwujudnya Sistem Ketatalaksanaan Pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	Persentase SKPD Provinsi yang menyusun Peta Proses Bisnis Provinsi Papua Penyusunan Pola Hubungan Kerja Antar SKPD berbasis Pola Kerja Terpadu Pendampingan dan Monev implementasi Pola Hubungan Kerja antar SKPD Penyusunan PERGUB TND Elektronik	1. Membentuk Tim Kerja dengan pengangkatan dalam SK Gubernur. 2. Optimalisasi tugas – tugas Tim dengan melaksanakan klinik/ pertemuan, konseling bagi OPD dalam penyusunan dan evaluasi SOP di Provinsi Papua	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan akuntabilitas
12	Penyelenggaraan SOP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK Gubernur Persentase SKPD yang memiliki SOP yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Jumlah SKPD yang di evaluasi penerapan SOP-nya		
13	Penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja	Meningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah Papan nama pejabat struktural yang terpasang Persentase sarana dan prasarana kerja sesuai dengan standarisasi Pendampingan dan Monev implementasi standarisasi sarana dan Prasarana	3. Melakukan koordinasi dengan OPD yang akan dipasang papan nama jabatan 4. Membuat SK. Gubernur tentang pembagian ruangan bagi OPD	

No	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
14	Penataan dan penyusunan pedoman tata ruang kantor pemerintah	Sda	Persentase OPD yang menempati ruangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Membuat SK. Gubernur tentang pembagian ruangan bagi OPD	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan akuntabilitas
15	Sosialisasi Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua		Persentase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan		
16	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Papua	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Papua	1. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja p emerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI 2. Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/LAKIP 3. Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	1. Membentuk Tim Kerja dengan SK. Gubernur 2. Melakukan koordinasi intens dengan SKPD terkait ketersediaan data LKj 3. Melakukan koordinasi intens dengan Kemendagri dan Kemenpan dan RB terkait peningkatan nilai kinerja 4. Membuka pendampingan bagi SKPD dalam penyusunan IKU SKPD 5. Koordinasi SKPD terkait penerapan Reformasi Birokrasi	

NO.	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
17	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Kab/Kota se Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Sda	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan akuntabilitas
18	Fasilitasi Penyusunan IKU dan PK SKPD dilingkungan Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Papua	Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua		
19	Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (RB)	meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)		
			Predikat Penilaian PMPRB Provinsi Papua		
			Persentase Kab/Kota dapat melaporkan PMPRB		
			Persentase Kab/Kota yang mendapat predikat baik sesuai evaluasi PMPRB dari KemenPANRB		
20	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua		Jumlah Dokumen Road Map RB Pemerintah Provinsi Papua		

NO.	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
21	Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase SKPD Provinsi dan Kab/Kota se Papua yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Sda	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan akuntabilitas
22	Pendidikan dan Pelatihan		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Melakukan pendataan kompetensi ASN Biro Organisasi dan penempatan sesuai kompetensi	
23	Bimtek Penyusunan uraian jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua		Jumlah Penganalisis Uraian Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	1. Melakukan Bimtek 2. Membentuk Tim Kerja dengan SK. Gubernur 3. Melakukan pendampingan penyusunan ANJAB, ABK, data FORJAB dan data JAFUNG pada SKPD	
24	Penyusunan Analisis Jabatan Pemerintah Provinsi Papua		Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan		
25	Bimtek Penyusunan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua		Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua		
			Jumlah penganalisis ABK pada SKPD Provinsi		
Persentase rekomendasi ABK yang ditindaklanjuti					

NO.	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
26	Penyusunan data formasi jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Papua	s.d.a	Persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua	s.d.a	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan akuntabilitas
			Jumlah penganalisis formasi jabatan pada SKPD di Provinsi Papua		
27	Bimtek Evaluasi jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua		Persentase penganalisis evaluasi Jabatan pada SKPD Provinsi Papua		
28	Penyusunan Evaluasi Jabatan pada SKPD dilingkungan Provinsi Papua		Cakupan OPD Provinsi yang sudah dilakukan evaluasi dan/atau analisis jabatan		
29	Bimtek Pengembangan JAFUNG tertentu dan jabatan pelaksana dan pemberian Tunjangan kinerja daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua		Persentase penganalisis Jabatan fungsional umum dan tertentu pada SKPD		
			Persentase jabatan fungsional umum dan tertentu pada SKPD di provinsi papua		
30	Penyusunan standar kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua		Persentase SKPD Provinsi yang memiliki standar kompetensi		
31	Bimtek penyusunan ANJAB dilingkungan pemerintah Provinsi Papua		persentase penganalisis Jabatan di SKPD Provinsi Papua		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan sesuai visi misi Gubernur, Biro Organisasi telah menetapkan tujuan, sasaran sesuai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun anggaran.

6.3. INDIKASI KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan, sasaran, indikator dan data capaian sebelum RPJMD dan target yang akan dicapai pada Tahun 2024-2026 terdapat dalam Tabel 3 terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Biro Organisasi ditetapkan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik baik secara kuantitatif ataupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program dan kegiatan. Indikator kinerja Biro Organisasi yang bersinergi dengan RPD 2024-2026 serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Biro Organisasi tergambar pada Tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Biro Organisasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada Peraturan Gubernur Nomor ..Tahun 2023 tentang RPD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode 2023	Taarget Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2026
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(7)
?	Indeks Reformasi Birokrasi						
		Indeks	67	75,05	80,05		75 80.50
2	Nilai SAKIP	Nilai	66,05	75,39	80,05	80,50	80,50
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	95	95	95	95	95

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website : <http://www.orpa.papua.go.id> Email : organisasi_papua@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PAPUA NOMOR : 061/ 19.a/ Ro.Orgs

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dengan Keputusan Kepala Biro;
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang/2

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
14. Peraturan Gubernur Papua Nomor .5 Tahun 2023 tentang RPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bahwa Keputusan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Organisasi periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : IKU Biro Organisasi ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Provinsi Papua dan masa berakhirnya Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura

Pada Tanggal 13 Pebruari 2024



KEPALA BIRO,

LINDA ONIBALA, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720911 199112 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua di Jayapura dan
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura.

Lampiran /4

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA
NOMOR : 061 / 19.a/ Ro.Orgs
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA
Periode 2024-2026

1. Instansi : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua
2. Tugas Pokok dan Fungsi: Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan Analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana
3. Indikator Kinerja Utama :

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan Tepat Ukuran.	Formulasi: $\left(\frac{\text{persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran}}{\text{Jumlah OPD}} \right)$ Kriteria OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sesuai dengan peraturan PP Nomor 18/2016	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2		Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	Formulasi: $\left(\frac{\text{Jumlah(KAB/KOTA) yang tepat fungsi dan tepat ukuran}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}} \times 100\% \right)$ Kriteria Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sesuai dengan peraturan PP Nomor 18/2016	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

3.	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki data informasi jabatan	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan}}{\text{Jumlah Organisasi Perangkat Daerah}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4	s.d.a	Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki ABK}}{\text{jumlah Seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
5	s.d.a	persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
6	s.d.a	Persentase jabatan fungsional tertentu pada SKPD di Provinsi Papua	Formulasi: $\frac{\text{Persentase JAFUNG tertentu yang sudah mendapat penetapan SK. Gubernur}}{\text{persentase keseluruhan JAFUNG pada SKPD}} \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
7	s.d.a	Persentase SKPD yang memiliki Evaluasi Jabatan di Provinsi Papua	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki Evaluasi Jabatan}}{\text{jumlah Seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
8.	s.d.a	Cakupan OPD Provinsi yang sudah dilakukan Analisis dan/atau evaluasi jabatan	Formulasi: $\left(\frac{\text{OPD Provinsi yang sudah dilakukan Analisis dan/atau evaluasi jabatan}}{\text{Jumlah OPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

9	s.d.a	Persentase SKPD yang memiliki Kompetensi Jabatan di Provinsi Papua	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki Kompetensi Jabatan}}{\text{jumlah Seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
10	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK. Gubernur	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase penetapan SOP SKPD yang mendapat penetapan SK. gubernur}}{\text{keseluruhan SOP SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Tatalaksana	Bagian Tatalaksana
11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase SKPD yang melaksanakan SPP	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang melaksanakan SPP}}{\text{Jumlah SKPD Pelaksana SPP}} \right) \times 100\%$	Bagian Tatalaksana	Bagian Tatalaksana
		Persentase UPP yang melaksanakan SPP	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase UPP yang melaksanakan SPP}}{\text{Jumlah UPP Pelaksana SPP}} \right) \times 100\%$		
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI	Formulasi: (Nilai evaluasi SAKIP)	Biro Organisasi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua	KEMENPAN dan RB R.I
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro Organisasi Setda Prov.Papua	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah B i r o O r g a n i s a s i oleh Inspektorat Provinsi Papua	Formulasi: (Nilai evaluasi SAKIP)	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA
16	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua	Formulasi: (Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi)	Biro Organisasi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua	KEMENPAN dan RB R.I

17	Meningkatnya pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	Nilai Budaya Kerja	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	KEMENPAN dan RB R.I
----	--	------------------	--------------------	--	---------------------

Jayapura, 13 Pebruari 2024



KEPALA BIRO,

LINDA ONIBALA, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720911 199112 2

Tabel 1
Pencapaian IKU Biro Organisasi TA 2019 s/d 2023

Tujuan	Sasaran	Kondisi Awal	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Target
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)	Adanya tumpang tindih urusan pada SKPD	Persentase perangkat daerah yang rasional, porposional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran	persentase	85%	93%	109%				90%	83%	92%	95%	131%	138%	100%	114%	114%	100%
		belum semua program pusat dapat diimplementasikan didaerah	Presentase kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	persentase							90%	86%	96%	95%	96,6%	101,6%	100,0%	100,0%	100%	100%
		Adanya beberapa Kab/Kota belum taat asas dalam pelaksanaan penataan Kelembagaan	Cakupan monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kab/kota	persentase	75%	100%	133%	10%	45%	448%				5%	24%	480%				5%
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Belum semua SKPD memiliki Standar Pelayanan Publik	Presentase SKPD yang melaksanakan SPP	Persentase				35%	23%	91%	50%	29%	57,14%	15%	9%	60,0%	100%	86%	85,7%	100%
	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	SOP belum digunakan optimal dalam pelaksanaan TUSI organisasi SKPD	persentase SKPD yang memiliki SOP dan mendapat penetapan dengan SK Gubernur	Persentase				35%	74%	212,3.%	35%	80%	229%	10%	80%	800%	100%	100%	100%	35%
	Peningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	penataan standar sarana dan parasarana belum sesuai aturan	Jumlah Papan Nama Pejabat Struktural yang terpasang	Jumlah				752.	410.	55%	411.	411.	100%							

Tabel 1
Pencapaian IKU Biro Organisasi TA 2019 s/d 2023

Tujuan	Sasaran	Kondisi Awal	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Target
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	RENSTRAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
sda	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	1. Meningkatnya pemahaman SAKIP oleh SKPD dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi yang	1. 'Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI	Nilai	B	B(62,6)	B(62,6)	BB	64,53	B(64,53)	BE		B (64,57	BE		B(65.00 prediksi)	B		66,05% Realisasi 2022	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Biro Organisasi Setda Prov.Papua	2. Adanya teraktualisasi dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	2. 'Nilai evaluasi AKIP/Lkj Biro Organisasi	Nilai	BB	A(84,32)	A(84,32)	BB	87,35	87,35	AA		A(87,53	A		AA(91 prediksi)			87,97% Realisasi 2022	
	Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Papua	belum tersedianya dokumen Peraturan Gubernur tentang Road Map RB	Predikat Penilaian PMPRB Provinsi Papua	Nilai	E	B(61,64)	B(61,64)	CC	56,61	CC(56,61)	BE		CC (56,96	BE		CC(57.00) prediksi				B
	Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	dokumen ANJAB, ABK , Formasi Jabatan, Evaluasi Jabatan belum mendapat penetapan Gubernur	Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan	persentase							100%		100%	100%	100%	100%				
			Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua	persentase							100%		100%	100%	100%	100%				
			persentase OPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papu	persentase	50%	0%	72%				25%		100%	100%	100%	100%				25%
		Data Jabatan Fungsional Belum mendapat penetapan Gubernur	Persentase Jabatan Fungsional tertentu pada SKPD di Provinsi Papua	88%							100%	100%	100%			100%				
		Dokumen ABJAB, ABK, Evaluasi Jabatan belum mendapat penetapan Gubernur	Persentase SKPD yang memiliki evaluasi jabatan Provinsi Papua.		Persentase	65%	61%	94%			100%	100%	100%			100%				
			Cakupan OPD Provinsi yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan	persentase	50%	0%	0%	35.%	35.%	100%	100%	100%	100%			100%				

Tabel 1
Pencapaian IKU Biro Organisasi TA 2019 s/d 2023

Tujuan	Sasaran	Kondisi Awal	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Target
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Persentase OPD yang memiliki data kompetensi jabatan	persentase										100%	100%	100%				

Jayapura, 16 Pebruari 2023

KEPALA BIRO,



LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720911 199112 2 001

PENJELASAN :

Berdasarkan data tersebut diatas rata-rata Biro Organisasi telah menyelesaikan target dari indikator yang ditetapkan dalam RENSTRA Biro, bahkan ada beberapa indikator dapat diselesaikan dan tercapai 100% pada tahun ke-4 RENSTRA begitu pula dengan indikator yang terkait dengan RPJMD telah melewati target dari beberapa indikator dalam RPJMD yaitu 'persentase OPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua serta ada indikator yang belum dapat dicapai yaitu Predikat Penilaian PMPRB Provinsi Papua dan Nilai SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB hal inilah yang perlu ditindaklanjuti Biro Organisasi untuk segera membenahi administrasi dan aparatur serta membangun koordinasi lintas SKPD untuk mencapai target dalam

Tabel 1
Pencapaian IKU Biro Organisasi TA 2019 s/d 2023

Tujuan	Sasaran	Kondisi Awal	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Target
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	RENSTRAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

TABEL 2

PENGUKURAN IKU BIRO ORGANISASI TAHUN 2019 sd 2023 DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN DAN TARGET PADA RPJMD PROVINSI PAPUA

Tujuan	Sasaran	Kondisi Awal	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Target RPJMD 2023	Penurunan dan Kenaikan
					Target	Realisas	Capaian	Target	Realisas	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisas	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerint a han yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Papua	1. Meningkatnya pemahaman SAKIP oleh SKPD dalam pelaksanaan tugas- tugas organisasi yang teraktualisasi dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Adanya komitmen dari Kabupaten/Kota khususnya 15 SKPD sampel dalam meningkatkan SAKIP	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPAN RB RI	Nilai	B	B(62,6)	B(62,6)	BB	64,53	B(64,53)	BB		BB(70.00 prediksi)	BB		B(65.00 prediksi)	BB	B	66,05% REALISASI 2022	BB	Belum ada hasil penilaian MENPAN untuk LKJ 2023
	Terwujudnya pelaksanaan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	SOP belum digunakan optimal dalam pelaksanaan TUSI organisasi SKPD	Persentase SKPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama	Persentase				35%	74%	212,3.%	35%	80%	229%	10%	80%	800%	100%	100%	100%	100%	
	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Sebagian besar SKPD Provinsi belum memiliki uraian jabatan	Persentase OPD yang memiliki data Uraian Jabatan	Persentase									100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Sebagian besar SKPD Provinsi dan Kab/Kota belum memiliki ANJAB, ABK	Cakupan OPD Provinsi yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan	Persentase	50%	0%	0%	35.%	35.%	100%			100%			100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase rekomendasi ABK yang ditindaklanjuti	Persentase									100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	15%

Jayapura, 16 Pebruari 2023

Berdasarkan Tabel tersebut menunjukan bahwa Biro Organisasi telah menyelesaikan target dari beberapa indikator dalam RPJMD Papua terkait, dengan capaian 100 % dan dokumennya akan ditetapkan dengan peraturan Gubernur Papua, kecuali indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah oleh Kemenpan RI yang masih mendapat nilai "B" belum dapat mencapai target RPJMD

KEPALA BIRO,

LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720911 199112 2 001

TABEL 3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH PRVINSI PAPUA

SKPD : BIRO ORGANISASI SERTA PROVINSI PAPUA

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.	PROGRAM PENUNJANG URSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI											4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.101.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Dokumen Perangkat daerah	Dokumen	19.000.000	Dokumen	20.900.000	Dokumen	24.035.000	Dokumen	63.935.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD belum tersusun	Dokumen	19.000.000	Dokumen	20.900.000	Dokumen	24.035.000	Dokumen	63.935.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01. 1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD belum tersusun	Dokumen	15.000.000	Dokumen	16.500.000	Dokumen	18.975.000	Dokumen	50.475.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.1.01.04	Koordinasi dan Peyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen DPA- SKPD belum tersusun	Dokumen	15.000.000	Dokumen	16.500.000	Dokumen	18.975.000	Dokumen	50.475.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.1.01.05	Koordinasi dan Peyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD belum tersusun	Dokumen	15.000.000	Dokumen	16.500.000	Dokumen	18.975.000	Dokumen	50.475.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.1.01.06	Koordinasi dan Peyusunan Laporan Capain Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Laporan Capain Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD belum tersusun	Laporan	15.000.000	Laporan	16.500.000	Laporan	18.975.000	Laporan	50.475.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											-	
01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Meneriama Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan belum tersusun	34 orang/Bulan	6.996.089.060	34 orang/Bulan	7.695.697.966	34 orang/Bulan	6.996.089.060	34 orang/Bulan	21.687.876.086	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun belum tersusun	Laporan	15.000.000	Laporan	16.500.000	Laporan	18.975.000	Laporan	50.475.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.102.06	Pengelolaan dan Peyiapan Bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut Pemeriksaan	Dokumen Bahan tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut Pemeriksaan belum tersusun	Dokumen	15.000.000	Dokumen	16.500.000	Dokumen	18.975.000	Dokumen	50.475.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.102.07	Koordinasi dan Peyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/ Bulanan/Triwulanan/Semestran SKPDdan laporan koordinasi Peyusunan laporan Keuangan/ Bulanan/Triwulanan,Semestran SKPD	Laporan Keuangan/ Bulanan/Triwulanan/Semestran SKPDdan laporan koordinasi Peyusunan laporan Keuangan/ Bulanan/Triwulanan,Semestran SKPD belum tersusun	Laporan	15.000.000	Laporan	16.500.000	Laporan	18.975.000	Laporan	50.475.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.1.03	Administrasi barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah											4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.103.01	Peyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD belum tersusun	Dokumen	15.000.000	Dokumen	16.500.000	Dokumen	18.975.000	Dokumen	50.475.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.103.05	Rekonsiliasi dan Peyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Peyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Peyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD belum tersusun	Laporan	15.000.000	Laporan	16.500.000	Laporan	18.975.000	Laporan	50.475.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD belum tersusun	Laporan	15.000.000	Laporan	16.500.000	Laporan	18.975.000	Laporan	50.475.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.104.01	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Tersedianya Paket Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Paket		Paket	-	Paket	-	Paket	-	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.104.06	Pemulagan Pegawai Yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulagan pegawai Yang meninggal dalam melaksanakan Tugas	anggaran Pemulagan Pegawai Yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas belum tersusun	Orang	25.000.000	Orang	27.500.000	Orang	31.625.000	Orang	84.125.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.104.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	belum semua ASN Biro mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	155.000.000	Orang	170.500.000	Orang	196.075.000	Orang	521.575.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.104.09	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undagan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undagan	adanya regulasi baru untuk di Sosialisasi Peraturan Perundang-	Orang	250.000.000	Orang	275.000.000	Orang	316.250.000	Orang	841.250.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.104.10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undagan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undagan	Kebutuhan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undagan	Orang	300.000.000	Orang	330.000.000	Orang	379.500.000	Orang	1.009.500.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.	Administrasi Umum Perangkat Daerah							-				4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.02	Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor banyak yang rusak	Paket	350.000.000	Paket	385.000.000	Paket	442.750.000	Paket	1.177.750.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.03	Peyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di Sediakan	adanya Peralatan Rumah Tangga yang rusak	Paket	30.000.000	Paket	33.000.000	Paket	37.950.000	Paket	100.950.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.04	Peyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	penyediaan kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Paket	65.000.000	Paket	71.500.000	Paket	82.225.000	Paket	218.725.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan yang di Sediakan	Pengadaan Barang Cetakan dan Pengadaan untuk keperluan organisasi	Paket	700.000.000	Paket	770.000.000	Paket	885.500.000	Paket	2.355.500.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undagan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undagan yang di Sediakan	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undagan	Dokumen	19.800.000	Dokumen	21.780.000	Dokumen	25.047.000	Dokumen	66.627.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang di Sediakan	Kebutuhan Bahan/ Material untuk pelaksanaan Tugas organisasi	Paket	200.000.000	Paket	220.000.000	Paket	253.000.000	Paket	673.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi Tamu	Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	300.000.000	Laporan	330.000.000	Laporan	379.500.000	Laporan	1.009.500.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kebutuhan pelaksanaan TUPOKSI pada rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD keluar daerah	Laporan	2.000.000.000	Laporan	2.200.000.000	Laporan	2.530.000.000	Laporan	6.730.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penata Usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Penata Usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD belum optimal	Dokumen	30.000.000	Dokumen	33.000.000	Dokumen	37.950.000	Dokumen	100.950.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.106	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.106.01	Pengadaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Disediakan	Belum semua pejabat mendapat Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Unit	400.000.000	Unit	400.000.000	Unit	460.000.000	Unit	1.260.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.106.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di Sediakan	Adanya Mebel yang rusak	Unit	100.000.000	Unit	100.000.000	Unit	115.000.000	Unit	315.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0	Kota Jayapura
01.106.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bagunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bagunan lainnya yang disedikan	adanya Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bagunan lainnya yang rusak	Unit	100.000.000	Unit	100.000.000	Unit	115.000.000	Unit	315.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
1.107	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.107.01	Penyediaan Jasa Surat Meyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Meyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	45.000.000	Laporan	45.000.000	Laporan	51.750.000	Laporan	141.750.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.107.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	adanya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang rusak	Laporan	200.000.000	Laporan	200.000.000	Laporan	230.000.000	Laporan	630.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
1.108	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
1.108.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan Peroragan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang diPelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Unit	175.000.000	Unit	175.000.000	Unit	201.250.000	Unit	551.250.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
1.108.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas Oprasional atau Lapangan yang di Pelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan kendaraan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Oprasional atau Lapangan	Unit	25.000.000	Unit	25.000.000	Unit	28.750.000	Unit	78.750.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
1.108.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	65.000.000	Unit	65.000.000	Unit	74.750.000	Unit	204.750.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
1.108.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Gedung	75.000.000	Gedung	75.000.000	Gedung	86.250.000	Gedung	236.250.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
1.108.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bagunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bagunan lainnya yang diPelihara /Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bagunan Lainnya	Gedung	75.000.000	Gedung	75.000.000	Gedung	86.250.000	Gedung	236.250.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Kota Jayapura
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI												
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analis Jabatan												
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	1. 1. Presentase OPD pemerintah daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Adanya tumpang tindih urusan pemerintahan dalam satu Perangkat	43 OPD	2.000.000.000	43 OPD	2.000.000.000	47 OPD	2.300.000.000	47 OPD	6.300.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
		1.2. Jumlah PERDA dan PERGUB di Bidang Kelembagaan	Terdapat lebih dari 3 Urusan Pemrintahan dalam satu Perangkat Daerah	1 PERDA dan 43 PERGUB	1.000.000.000	1 PERDA dan 43 PERGUB	1.000.000.000	1 PERDA dan 47 PERGUB	1.150.000.000	1 PERDA dan 47 PERGUB	3.150.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
			Terdapat UPTD dan Cabang disesuaikan dengan Perubahan Wilayah Kerja Perangkat Daerah	10 PERGUB UPT dan Cabang Dinas	500.000.000	10 PERGUB UPT dan Cabang Dinas	500.000.000	12 PERGUB UPT dan Cabang Dinas	575.000.000	12 PERGUB UPT dan Cabang Dinas	1.575.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	9 Kab Kota
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota yang terfasilitasi	29 Kab/Kota	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000		1.725.000.000	9	4.725.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
	Rapat Kerja koordinasi Bidang Organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab.Kota	kelembagaan perangkat daerah kab/kota yang sesuai kebutuhan dan Peraturan yang berlaku	1. Belum ada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Perangkat khusus bagi kab.kota 2. masih terdapat kab/kota yang tidak melakukan fasilitasi ke Provinsi dalam penataan kelembagaan	9 kab.kota	1.500.000.000	9 kab.kota	1.500.000.000	9 kab.kota	1.725.000.000	9 kab.kota	4.725.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Ternate
	Monitoring dan Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kab.kota	Persentasi kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota yang tepat fungsi ukuran		35%	700.000.000	35%	700.000.000	30%	805.000.000	100%	2.205.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan , Analisis beban kerja dan Evaluasi jabatan	belum tersusunnya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi jabatan	100%	800.000.000	100%	500.000.000	100%	575.000.000	100%	1.875.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
	Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah OPD yang memiliki data Analisis Jabatan	1. Dilaksanakan penyusunan Anjab Fungsional 2. Anjab Struktural dan Pelaksana (100%)	100%	800.000.000	100%	500.000.000	100%	575.000.000	100%	1.875.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
	Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah OPD yang memiliki data Analisis Beban Kerja	1. Dilaksanakan penyusunan Analisis Beban Kerja Fungsional 2. Analisis Beban Kerja Struktural dan Pelaksana (100%)	100%	800.000.000	100%	500.000.000	100%	575.000.000	100%	1.875.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah OPD yang memiliki data Kompetensi Jabatan	1. Dilaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional 2. Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Pelaksana (100%)	100%	800.000.000	100%	500.000.000	100%	575.000.000	100%	1.875.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
	Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah OPD yang memiliki data Evaluasi Jabatan	100%	100%	800.000.000	-	-	-	-	100%	800.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
	Penyusunan Matrix Peran Hasil Kerja Analisis Jabatan	Jumlah OPD yang memiliki data Matrix Peran Hasil	30%	100%	900.000.000	100%	900.000.000	-	-	100%	1.800.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
	Sosialisasi Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Tersampainya Data Analisis Jabatan bagi	30%	100%	650.000.000	-	-	-	-	100%	650.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
	Sosialisasi Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Tersampainya Data Analisis Jabatan bagi	30%	100%	650.000.000	-	-	-	-	100%	650.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
	Sosialisasi Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Tersampainya Data Standar Kompetensi Jabatan bagi	30%	100%	650.000.000	-	-	-	-	100%	650.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
	Sosialisasi Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Tersampainya Data Evaluasi Jabatan bagi	30%	100%	650.000.000	-	-	-	-	100%	650.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
	Sosialisasi Matrix Peran Hasil Kerja Analisis Jabatan	Tersampainya Data Evaluasi Jabatan bagi	30%	100%	650.000.000	-	-	-	-	100%	650.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
	Penyusunan Formasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah OPD yang memiliki data Formasi Jabatan	100%	100%	750.000.000,-	100%	600.000.000	100%	402.500.000	100%	1.700.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
	Penyusunan PERGUB Analisis Jabatan, Analisis Beban, Kompetensi Jabatan dan Peta Jabatan	PERGUB Analisis Jabatan, Analisis Beban, Kompetensi Jabatan dan Peta Jabatan	30%	100%	500.000.000	-	-	-	-	100%	500.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
	Pengembangan Aplikasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Kompetensi Jabatan dan Evaluasi	Aplikasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan	40%	100%	1.000.000.000	100%	350.000.000	100%	402.500.000	100%	1.752.500.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja												
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Presentase SKPD Provinsi yang melaksanakan Reformasi Birokrasi; 2. Predikat penilaian PMPRB Provinsi Papua 3. Presentase Kab/kota yang melaksanakan Reformasi Birokrasi.	31%	60%	1.000.000.000	80%	1.000.000.000	100%	1.150.000.000	100%	3.150.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
			CC	B		B		BB		A		4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	
			25%	40%		60%		80%		100%		4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Kinerja	1. Nilai evaluasi Sakip Provinsi Papua; 2. Presentase SKPD yang mengumpulkan Sakip; 3. Presentase kab/kota yang melaporkan Sakip.	B	B	1.000.000.000	BB	1.000.000.000	A	1.150.000.000	A	3.150.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
			100%	100%		100%		100%		100%		4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	
			70%	80%		90%		95%		100%		4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	
4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1. Presentase SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan Budaya Kerja; 2. Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja dalam pelaksanaan tugas; 3. Presentase ASN di lingkungan	20%	40%	500.000.000	60%	350.000.000	80%	402.500.000	100%	1.252.500.000	4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	Jayapura
			-	100%						100%		4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	
			10%	15%		20%		30%		50%		4.01.0.00.0.00.0.0 5. Biro Organisasi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	1. Presentase Penyusunan Peta Proses Bisnis SKPD;	30%	50%	1.000.000.000	70%	800.000.000	85%	920.000.000	100%	2.720.000.000	4.01.0.00.0.00.0.0	Jayapura
		2. Meningkatkan pemahaman penggunaan Tata Naskah Dinas di lingkungan SKPD Provinsi Papua	35 SKPD	35								5. Biro Organisasi	
		3. Presentase SKPD yang menerapkan SOP	10%	50%		75%		90%		100%		4.01.0.00.0.00.0.0	
4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1. Presentase SKPD yang melaksanakan Pelayanan Publik	37%	60%	1.000.000.000	80%	1.000.000.000	90%	1.150.000.000	100%	1.752.500.000	4.01.0.00.0.00.0.0	Jayapura
		2. Presentase UPP Provinsi Papua yang melaksanakan Forum Konsultasi Pelayanan Publik	3%	50%		75%		850%		100%		5. Biro Organisasi	
		3. Presentase SKPD Provinsi Papua yang melakukan Survei Kepuasan	30%	60%		80%		90%		100%		4.01.0.00.0.00.0.0	
			60%	80%		90%		95%		100%		5. Biro Organisasi	

JAYAPURA, 24 MARET 2024

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

SETDA

KEPALA BIRO

LINDA S ONIBALA, S.Sos.MM
NIP.19720911 199112 2 001

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH PRVINSI PAPUA 2024 - 2026

SKPD : BIRO ORGANISASI SERTA PROVINSI PAPUA

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub kegiatan (Output)	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
01.	PROGRAM PENUNJANG URSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Terwujudnya pelayanan administrasi umum dan jasa penunjang Biro Organisasi	Persentase OPD dalam peningkatan pelayanan administrasi jasa penunjang Biro Organisasi	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor Biro Organisasi	persentase layanan Biro Organisasi	100%		100%		100%		100%		4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura	
01.101.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi	Persentase Administrasi OPD dalam mendukung pelaksanaan TUPOKSI												4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen RKA SKPD			Dokumen	-	Dokumen	6,720,000	Dokumen	7,728,000	Dokumen	14,448,000	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura	
01. 1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	51,000,000	Dokumen	51,000,000	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura	
01.1.01.04	Koordinasi dan Peyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen DPA-SKPD			Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura	
01.1.01.05	Koordinasi dan Peyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD			Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura	
01.1.01.06	Koordinasi dan Peyusunan Laporan Capain Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Laporan Capain Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan	-	Laporan	6,720,000	Laporan	7,728,000	Laporan	14,448,000	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura	
01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Biro Organisasi	Persentase administrasi Keuangan Biro Organisasi						8,000,000							
01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	-	Laporan	8,000,000	Laporan	9,200,000	Laporan	17,200,000	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura			
01.102.07	Koordinasi dan Peyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan, Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan/ Bulanan/Triwulanan/Semestran SKPDdan laporan koordinasi Peyusunan laporan Keuangan/ Bulanan/Triwulanan,Semestran SKPD	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura			

01.104.01	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terwujudnya Administrasi Umum Biro Organisasi	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Persentase Kelembagaan perangkat daerah Provinsi	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Dokumen	-	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.104.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti			Orang	-	Orang	-	Orang	-	Laporan	-	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.104.09	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undagan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Orang	-	Orang	-	Orang	-	Dokumen	-	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.104.10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undagan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undagan			Orang	-	Orang	-	Orang	-	Laporan	-	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Biro Organisasi			dokumen		dokumen	806,330,000	dokumen	927,279,500			4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.02	Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan			Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.03	Peyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di Sediakan			Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.04	Peyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			Paket	24,000,000	Paket	18,000,000	Paket	20,700,000	Paket	62,700,000	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan		Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan yang di Sediakan			Paket	520,115,620	Paket	184,594,000	Paket	212,283,100	Paket	916,992,720	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.07	Penyediaan Bahan/ Material		Jumlah Paket Bahan/ Material yang di Sediakan			Paket	101,320,540	Paket	105,401,000	Paket	121,211,150	Paket	327,932,690	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan fasilitas Tamu	Terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Laporan	236,400,000	Laporan	140,000,000	Laporan	161,000,000	Laporan	537,400,000	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Laporan	645,325,000	Laporan	358,295,000	Laporan	412,039,250	Laporan	1,415,659,250	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.105.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		Jumlah Dokumen Penata Usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD			Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
1.107	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara dan teradministrasi dengan baik	Persentase jasa penunjang perlengkapan kantor yang disediakan	Terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik		-							4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
01.107.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan			Laporan	63,750,000.0	Laporan	52,830,000	Laporan	60,754,500	Laporan	177,334,500	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
1.108	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan dan penertiban administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan				-							4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
1.108.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Oprasional atau Lapagan	Terwujudnya penataan Organisasi	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang di Pelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Terwujudnya penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Provinsi dan Kab/Kota	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Unit	157,232,000	Unit	62,280,000	Unit	71,622,000	Unit	291,134,000	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
1.108.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			Unit	-	Unit	65,000,000	Unit	74,750,000	Unit	Rp 139,750,000.00	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Terwujudnya penataan Organisasi	Persentase penataan Organisasi	Terwujudnya penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Provinsi dan Kab/Kota	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	100%		-	100%		100%	100%		4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analis Jabatan	Terwujudnya penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Provinsi dan Kab/Kota	Persentase Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan OPD Provinsi dan Kab/Kota	Terwujudnya penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Provinsi dan Kab/Kota	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik		-							4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura

4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Penataan kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing)	1. 1. Presentase OPD pemerintah daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran
			1.2. Jumlah PERDA dan PERGUB di Bidang Kelembagaan
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		Jumlah pembinaan dan pengawasan kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota
	Rapat Kerja koordinasi Bidang Organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab.Kota		kelembagaan perangkat daerah kab/kota yang sesuai kebutuhan dan Peraturan yang berikau
	Monitoring dan Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kab.kota		Persentasi kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota yang tepat fungsi ukuran
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Terwujudnya penataan SDM aparatur yang kompeten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis jabatan , Analisis beban kerja dan Evaluasi jabatan

	100%	350,000,000	100%	250,000,000	100%	287,500,000	100%	887,500,000	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
	1 PERDA dan 43 PERGUB		1 PERDA dan 43 PERGUB		1 PERDA dan 47 PERGUB		1 PERDA dan 47 PERGUB		4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
	10 PERGUB UPT dan Cabang Dinas		10 PERGUB UPT dan Cabang Dinas		12 PERGUB UPT dan Cabang Dinas		12 PERGUB UPT dan Cabang g		4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
	9 kab.kota	600,000,000	9 kab.kota	499,751,000	9 kab.kota	574,713,650	9 kab.kota	1,674,464,650	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
	9 kab.kota	-	9 kab.kota		9 kab.kota	-	9 kab.kota	-	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
	35%	-	35%		30%	-	100%	-	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura
Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai	100%	1.149,997,450	100%	500,000,000	100%	575,000,000	100%	2.224,997,450	4.01.0.00.0.00.0.05 Biro Organisasi	Kota Jayapura

Persentase Tatalaksana pemerintahan yang efisiensi, efektif, responsif, transparan dan akuntabel

